

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Perang Dunia II dinyatakan berakhir pada tanggal 2 September 1945. Setelah kekalahan Jepang melawan pasukan Sekutu dan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, akhirnya pasukan Jepang terpaksa menyerah kalah. Kemudian, diadakan perjanjian Postdam yang berisi tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu. Berdasarkan perjanjian ini, komandan umum militer Jepang diserahkan kepada Jenderal Mac Arthur dari AS. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan adanya kontrol dari sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat membuat Jepang menjadi negara yang pasifis dan menimbulkan satu trauma kepada rakyat Jepang yang sukar hilangnya. Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah Jepang harus membuat konstitusi yang disesuaikan, yaitu konstitusi yang menganut prinsip pasifisme secara ketat dan melarang keterlibatan militer Jepang di luar pertahanan diri.

Jepang pasca Perang Dunia II hanya mempunyai Badan Pertahanan dan Pasukan Bela Diri (SDF), dimana Pasukan Bela Diri ini hanya untuk kepentingan pertahanan nasional. Namun, pada saat pecah Perang Teluk II mulai tampak perubahan sikap Jepang, yaitu adanya keterlibatan SDF (Self Defense Force) dalam operasi militer di Irak atas desakan Amerika Serikat yaitu dengan mengirimkan

..... dan hal ini merupakan masalah yang sensitif bagi

rakyat Jepang. Apalagi invasi ke Irak itu tidak mendapat payung resolusi PBB, tapi tetap dilakukan oleh Amerika Serikat yang tetap berusaha melibatkan banyak negara untuk mendukungnya dengan kontingen pasukan dan peralatan perang. Keterlibatan Jepang itu bagaimana pun merupakan kebijakan yang mengundang reaksi pro dan kontra di dalam negeri Jepang dan membawa dampak psikologis pasca Perang Teluk II. Apalagi setelah ternyata di Irak tidak ditemukan senjata pemusnah massal yang dijadikan alasan Amerika Serikat untuk menyerbu Irak.

Perubahan kebijakan pengembangan pasukan bela diri Jepang juga terjadi setelah peristiwa 11 September 2001, dimana pemerintahan Jepang melakukan perubahan mendasar mengenai kebijakan militer Jepang yang dilakukan oleh Parlemen Jepang (Diet), dengan menyetujui rancangan Undang-Undang anti terorisme, sehingga hal ini menyebabkan peranan SDF lebih luas dalam dunia internasional. Namun, Undang-Undang anti terorisme ini membatasi SDF hanya untuk memberikan dukungan “non tempur” antara lain dukungan logistik terhadap aksi militer melawan terorisme oleh Amerika, transportasi keperluan logis, operasi SAR serta bantuan kemanusiaan terhadap para pengungsi.

Pengiriman pasukan non-tempur ke Irak ini tetap menuai protes dari sebagian masyarakat Jepang yang menganggap bahwa pengiriman pasukan ke Irak tersebut melanggar konstitusi Jepang yang cinta damai. Sehingga dengan adanya pro dan kontra terhadap konstitusi Jepang yang menganut prinsip pasivisme (pasal 9 konstitusi 1947) ini kami mengangkat judul : “ **Reaksi Publik Jepang Terhadap Pengiriman Pasukan Non-Tempur Jepang Ke Irak** ”

C. Latar Belakang Masalah.

Pada Perang Dunia II, Jepang melakukan serangan pada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour 7 Desember 1941, dimana pada saat itu Jepang berpihak kepada Jerman Nazi yang kemudian menenggelamkan dan merusakkan kapal tempur Angkatan Laut Amerika. Sesudah Pearl Harbour, maka Filipina, Malaya, Indonesia, (pada saat itu masih Hindia Belanda), Australia, New Zealand, terbuka bagi serangan Jepang.¹

Namun jatuhnya 2 bom atom pada 6 dan 9 Agustus di Nagasaki dan Hiroshima yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu telah menghentikan dalam sekejap kekejaman Jepang di Asia dan Pasifik. Dengan serangan bom atom tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat dan Sekutu, serta mengalami kehancuran dan kerugian yang sangat besar, antara lain korban sebanyak 1.800.000 jiwa, kekayaan negara hancur, 40% wilayah dan 66 kota besar telah menjadi korban serangan, dan 30% kapasitas industri Jepang juga ikut hancur.²

Bagi Jepang PD II telah membawa dampak yang cukup menyedihkan dan menimbulkan trauma kepada rakyat Jepang yang sukar hilangnya. Dan ini merupakan pengalaman yang baru bagi bangsa Jepang. Perang Dunia II tidak hanya mendatangkan kerugian yang bersifat fisik saja, tetapi juga mendatangkan pengaruh psikologis yang cukup mendalam. Dari segi psikologis, kekalahan dan kehancuran akibat PD II telah membawa bangsa Jepang kepada suatu kesadaran dan pengakuan

¹ P.K Ojong, "Pearl Harbour", *Perang Pasifik*, KOMPAS, Jakarta, 2001, hal 2.

² Robert Edward, *Japan's Political System*, Prentice Hall Inc. New Jersey, 1978, hal 10

akan kegagalan sikap dan pandangan masa lampaunya. Semua rasa percaya diri yang tertanam dan berkembang sejak Restorasi Meiji telah rontok, bersama posisi internasionalnya yang telah dicapai pada saat itu.

Pihak Sekutu yang menang perang memaksa Jepang agar tidak mampu lagi memiliki kekuatan militer seperti masa sebelumnya. *The American War Navy Coordinating Commite* atau Panitia Perang Angkatan Laut AS kemudian merumuskan dua hal yang harus diwujudkan:

1. to ensure that Japan will not again become a manace to United State or to the peace and security of the world.
2. to bring about the eventual establishment of a peaceful and responsible government which should control closely as may be for principle of democracies self government.³

Guna menjamin Jepang dimasa depan tidak akan lagi jadi bangsa yang mempunyai politik dan militer yang agresif, tanggal 2 September 1945 Amerika Serikat melaksanakan SCAP (*Supreme Commander Allied Power*) di Jepang dibawah pimpinan *Jenderal Doughlas Mac Arthur*, dengan program utama pendudukan yaitu dimiliterisasi dan demokratisasi.⁴

Jenderal Mac Arthur merupakan orang yang paling berperan dalam kekalahan Jepang. Pada tanggal 2 September 1946, ia secara resmi menerima kekalahan Jepang di atas kapal AS di Teluk Tokyo. Sesuai aturan penyerahan kekalahan dalam perang, Kaisar Hirohito dan pemerintahan Jepang menjadi subjek dari Komandan Tentara Sekutu yang berkedudukan di Jepang. Posisi inilah yang diisi oleh Jenderal Douglas

³ *Ibid*, hal 19

Mac Arthur dan ia tinggal di Jepang selama lima setengah tahun untuk memimpin rekonstruksi dalam pemerintahan, industri dan sosial yang sesuai dengan keinginan AS. Pada tanggal 3 Mei 1947, UUD Jepang pasca perang secara resmi diberlakukan. UU yang penyusunannya dipenuhi campur tangan Komandan Tertinggi Tentara Sekutu, Douglas Mac Arthur itu, melucuti segala kekuasaan Kaisar Hirohito, kecuali kekuasaan simbolis, menetapkan aturan hak-hak warga negara, dan menghapuskan hak Jepang untuk melakukan perang.

Pada tahun 1947 dirancang sebuah konstitusi baru, dimana konstitusi tersebut sesuai dengan harapan sebagian besar rakyat Jepang dan disebut sebagai konstitusi perdamaian, karena pada pasal 9 Jepang dilarang untuk selamanya melakukan perang dan memelihara kekuatan militer.⁵ Sebuah ketentuan menyangkut militer Jepang tercantum dalam artikel 9 Konstitusi 1947, dimana rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan bangsa Jepang dan ancaman dan penggunaan kekuatan perang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Hal itu mendapat dukungan yang kuat dari pemerintahan dan warga negara Jepang dan ditafsirkan sebagai pemberian ijin bagi pembangunan Pasukan Bela Diri (SDF), namun melarang pasukan itu memiliki senjata nuklir atau pengiriman SDF ke luar Jepang.⁶

Pada tahun 1948, Uni Soviet dan Cina yang besar pengaruh komunisnya menjadi saingan baru Amerika Serikat, dan hal ini mendorong Amerika Serikat untuk mendukung Jepang yang dinilai telah menjadi bangsa yang loyal kepada Amerika

⁵ Tiemar Salam, *Dinamika Politik di Jepang - Dari Dominasi LDP hingga Terwujudnya Pemerintah*

Serikat selama diduduki 5 tahun untuk ikut memelihara keamanan Asia ataupun kekuatan pengimbang terhadap komunis. Maka sejak itu Jepang jadi sekutu utama Amerika Serikat di Asia. Tahun 1952 Jepang kembali menjadi negara bangsa yang berdaulat sejak ditanda tangannya Persetujuan Perdamaian dan Persetujuan Keamanan dengan Amerika Serikat di San Fransisco. Selanjutnya dekade pasca Perang Dunia II, Jepang mulai bangkit dari keterpurukanya karena Jepang lebih mempercayakan diri jaminan pertahanan dan keamananya pada Amerika Serikat serta lebih memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi dan ekspor.⁷ Kepentingan-kepentingan Amerika Serikat sebenarnya juga membawa keuntungan bagi Jepang. Konstitusi baru yang disahkan oleh Amerika Serikat kepada Jepang, dalam hal ini Jepang tidak menggunakan perang sebagai instrumen politik luar negeri, dengan demikian Amerika Serikat yang mengambil tanggung jawab pertahanan AS-Jepang. Sehingga biaya besar yang seharusnya dikeluarkan untuk pertahanan tidak perlu dikeluarkan karena ditanggung oleh AS dan biaya itu dapat difokuskan pada pembangunan ekonomi.

Pasifnya Jepang dalam urusan internasional merupakan keinginan Jepang sendiri yang menikmati status quo sebab cukup menguntungkan bagi kebijaksanaan ekonominya, lagi pula Perang Dingin yang terjadi antara kubu Uni Soviet dengan kubu AS tidak melibatkan Jepang walaupun pengaruhnya melebar hingga daerah Asia, sebab AS sebagai negara perlintangannya dengan segera mengambil alih keamanan negara tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Susan Hartis :

⁷ *Jepang & Negeri-Negeri Sekutunya*, Dunia Sifat Keluarganya, Amerika Serikat dan Persekutuan, hal 150

Until quite recently Japan has also had little reason for dissatisfaction with the situation in East and South East Asia eventhough the constant confrontation between communist and non-communist in the region since 1980 could hardly be considered an ideal situation either by Japan or any other non-communist state. The extention of the cold war to this region ensured continued American involvement which was the main factor enabling Japan to remain involved.⁸

Pada periode 1970-an terjadi perubahan-perubahan penting pada kebijakan pertahanan Jepang. Pada periode ini opini publik di Jepang bergeser ke arah penerimaan perjanjian pertahanan Jepang-AS dan SDF. Dari semua parpol oposisi yang ada, hanya partai komunis Jepang yang masih belum bisa menerima SDF dan perjanjian tersebut. Pembicaraan mengenai pertahanan, yang sebelumnya secara politis masih tabu, mulai mendapat perhatian masyarakat, ini terlihat antara lain dari terbentuknya Komite Khusus Pertahanan oleh Parlemen Jepang pada tahun 1980.⁹

Pada saat pecah Perang Teluk II, mulai tampak perubahan sikap Jepang mengeluarkan kecaman keras terhadap Irak tentang yang menginvasi Kuwait. Jepang mengeluarkan kecaman keras terhadap Irak tentang pelanggaran hukum internasional dan menetapkan sanksi dengan pembatalan semua pinjaman, pembelian minyak dan penghentian semua perdagangan dengan Irak.¹⁰

Namun setelah itu Jepang tidak bereaksi kembali karena menghadapi berbagai dilemma yang membuat pemerintah Jepang sulit mengambil kebijaksanaan. Hal ini

⁸Susan Hartis Rolef, "The changing of Japan Foreign Policy", *Asian Survey*, 1976, Vol xvi no 11, hal 1035.

⁹ Yukio Satoh, "The Evolution of Japanese Security Policy", *Adelphi Papers, The International Institute for Strategic Studies*, no 178, hal 6.

¹⁰ Takada Masayuki "Arms and Japan" *Adelphi Papers, The International Institute for Strategic Studies*, no 178, hal 6.

membuat pemerintah Amerika Serikat sebagai pemimpin invasi ke Irak, menuduh Jepang hanya bisa berlindung dibalik keamanan yang yang diberikan AS, dan tidak mau berkorban dalam krisis itu, pemerintah Bush segera mengeluarkan tuntutan agar Jepang membantu baik melalui pengiriman personel, maupun bantuan dana. Menanggapi tuntutan Amerika Serikat, pejabat pemerintah Jepang dan anggota-anggota pejabat teras LDP terpecah pada pro dan kontra antara mengubah sikap tradisi kebijaksanaan Jepang, yang mengandalkan sumbangan financial sebagai bentuk partisipasi, dan melanjutkan rencana bantuan logistik kepada pasukan multinasional. Namun kecaman keras dari Amerika Serikat, akhirnya membuat pemerintahan Jepang membuat UU baru yaitu, *Peace Operation Bill* yang disahkan oleh Diet (Parlemen Jepang) pada tanggal 15 Juni 1992 yang memungkinkan SDF untuk dikirim keluar negeri.¹¹ UU ini kemudian direvisi pada tahun 1998. Namun demikian, kontribusi Jepang masih sebatas pada bantuan administratif kepada pasukan multinasional.¹² Namun hal ini tetap menuai berbagai reaksi pro dan kontra publiknya terhadap upaya pertahanan Negara.

Pasca tragedi 11 September 2001 yang meruntuhkan gedung kembar World Trade Center (WTC) dan pusat pertahanan Amerika Serikat, mempengaruhi perubahan konstelasi politik internasional dan regional, khususnya Asia Pasifik. Dalam hal ini Amerika Serikat meminta dukungan kepada dunia internasional dalam

¹¹ Jiro Yamaguchi, "Japanese Security After End the Cold War", dalam Richard Leaver and James L Richardson ed *The Post Cold War Order : Diagnosis and Promises* Allen and Unwin 1992, hal

rangka memburu tersangka utama penyerangan terhadap WTC dan Pentagon telah merubah kebijakan pertahanan di kawasan Asia Pasifik khususnya Jepang yang menurut Amerika Serikat harus terlibat dalam memberikan dukungan kepada Amerika Serikat, karena seperti kita ketahui bahwa Jepang bergantung kepada Amerika Serikat dalam hal stabilitas dan keamanan demi terpenuhinya kepentingan-kepentingan ekonominya.

Perang terhadap terorisme yang menjadi slogan AS mempengaruhi sikap Jepang sebagai sekutu terdekatnya. Selain mengeluarkan kecaman keras terhadap Afganistan. Hanya dalam kurun waktu yang singkat, Diet mengesahkan *Anti Terrorism Special Measure Law*. Aturan khusus ini memungkinkan Jepang bersikap lebih proaktif dalam menghadapi aksi terorisme dan dapat membantu dalam bantuan medis, transportasi, suplai dan reparasi. Ratifikasi peraturan anti terorisme ini kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan kapal milik *Japan Maritime Self Defense Force* (JMSDF / Kaigun) ke Diego Garcia, tempat dimana pasukan multinasional dibawah pimpinan Amerika Serikat berkedudukan untuk menyerang Afghanistan.¹³

Sikap pemerintah Jepang ini cukup mengejutkan karena untuk pertamakalinya sejak Perang Dunia berakhir, Jepang berani mengambil tindakan yang sangat cepat terhadap masalah internasional. Presiden AS, Goerge W Bush Jr dalam peringatan 60 tahun penyerangan terhadap Pearl Harbour memuji sikap pemerintahan Junichiro

¹³ Diakses dari < <http://www.gurita.com/DM.asp?c=0&d=50010862202> >

Koizumi dengan mengatakan bahwa selama lebih dari setengah abad, musuh nomor satu AS telah berubah menjadi sekutu yang paling dipercaya AS.¹⁴

Perkembangan politik di dunia Internasional, cepat atau lambat pasti akan berdampak terhadap Jepang. Sebagai negara industri maju yang miskin bahan baku dan butuh daerah pemasaran, keamanan di sepanjang jalur perdagangan internasional sangat penting artinya bagi perekonomian Jepang, terutama jalur yang terbentang dari Timur Tengah, melintasi Samudera Hindia, serta Laut Cina Selatan dan Timur.¹⁵ Bagi Cina perubahan militer Jepang merupakan kekhawatiran karena akan menjadi saingan bahkan akan menjadi kekuatan baru di Asia Timur dan mungkin saja akan merugikan kepentingan Cina di kawasan Asia. Akan tetapi Cina tidak mau dinilai oleh dunia internasional menghalang-halangi keinginan Amerika Serikat untuk memberantas terorisisme, sehingga pilihan mendukung dan tidak menunjukkan sikap menentang atas keinginan Jepang ikut dalam usaha internasional memberantas terorisisme menjadi pilihan yang harus diambil mengingat Jepang sendiri merupakan mitra dagang Cina yang terbesar didunia.¹⁶

Ketegangan nuklir di Korut juga akan segera memicu Jepang menjadi negara nuklir untuk menghadapi Korut yang jelas-jelas telah mengakui bahwa dirinya telah memiliki dua rudal nuklir dan akan memproduksinya lagi untuk menghadapi ancaman AS. Bagi Korut, Jepang adalah bagian AS di wilayah Asia-Pasifik yang

¹⁴ Yujiro Iwamoto and Sisira Edrippulige, "Japan's response to the war against terrorism", diakses dari < <http://www.questa.com/PM.qst?a=o&d=500071718> >

¹⁵ Sandhiana Sunardi, "Korut dan Jepang"

sangat mengancam Pyongyang. Apalagi secara historis, Jepang pernah menjajah Semenanjung Korea pada paruh pertama abad ke-20 yang menimbulkan kesengsaraan luas. Sampai saat ini, luka sejarah tersebut tampaknya masih belum sembuh dan sering menjadi pemicu krisis antara Korea (baik Korsel maupun Korut) dengan Jepang.¹⁷ Dan hal ini akan menimbulkan sikap curiga oleh Negara- Negara tetangga terdekat Jepang dalam peranan militernya.

Pengiriman pasukan militer Jepang ke Irak merupakan kemajuan yang luar biasa dan keterlibatan Jepang itu bagaimanapun merupakan kebijakan yang mengundang reaksi pro dan kontra di dalam negeri Jepang. Dalam hal ini pengiriman pasukan militer itu juga membentuk opini publik Jepang, dalam persoalan konsistensi garis politik luar negeri non Agresi yang diputuskan dalam konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II.

Perubahan Jepang dalam mengambil peran dalam menjaga perdamaian dunia terjadi ketika Junichiro Koizumi mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, dimana PM Junichiro Koizumi ingin mengadakan perubahan pada UU Jepang sehingga pasukan militer Jepang bisa berperan dalam dunia internasional. Terutama pada saat ini dimana konflik yang sedang hangat di dunia internasional diantaranya adalah konflik Amerika Serikat- Irak. PM Koizumi sangat berharap agar Jepang bisa berperan dalam membangun kembali Irak pasca Invasi AS.¹⁸ Hal ini sungguh

¹⁷ Suara Merdeka, 17 Januari 2004.

¹⁸ www.mw.nl/ranesi/html/wd-jepang.html-20k-14 Maret 2004

dipertanyakan. Karena itulah setiap sistem persepsi memiliki pertanyaan sendiri-sendiri. Maka, para pengamat dari berbagai titik pandang yang berlainan dengan sendirinya akan mengarah pada jawaban atau fakta yang berbeda-beda.²⁰

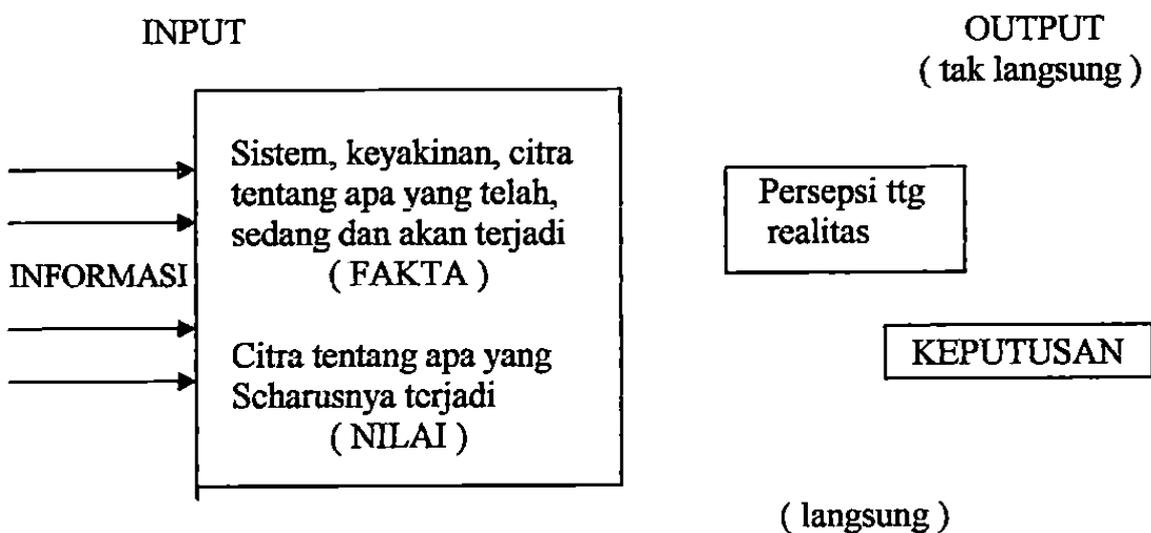
Teorisasi sistem perseptual menurut Jones, membedakan tiga komponen Persepsi yaitu, nilai, keyakinan dan pengetahuan. Nilai menurut Jones, adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Karena menurut Jones, nilai tidak mengacu pada yang ada, melainkan apa yang seharusnya ada. Artinya, nilai dalam hal ini dapat dipastikan memberikan harga relatif kepada obyek dan kondisi. Sedangkan keyakinan menurut Jones adalah sikap, bahwa suatu diskripsi realitas adalah benar, terbukti, atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri, ini adalah suatu analitis satuan-satuan data kedalam suatu pola yang telah teruji.²¹ Oleh sebab itu menurut Jones, persepsi sangat menentukan tindakan seseorang di dalam pembuatan suatu keputusan, karena setiap tindakan seseorang akan selalu didasarkan pada apa yang mereka ketahui. Dengan kata lain, persepsi menurut Jones ialah :

“Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi tertentu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang kenyataan”.²²

Sedangkan persepsi menurut Ole R Holsti, ialah :

“Tanggapan seseorang terhadap suatu situasi atau stimulus didasarkan pada persepsi tentang situasi itu, dan manusia dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis yang memengaruhi persepsinya terhadap sesuatu. Persepsi tercipta dari suatu system keyakinan yang terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang individu-individu. Citra itu meliputi citra terhadap realitas masa kini dan realitas masa depan serta preferensi nilai tentang apa yang semestinya terjadi”.²³

Diagram.



Sumber: Mohtar Mas' oed, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Terorisasi, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 21, dari : Ole R. Holsti, " The Beliefe System and National Images : A Case Study".

Dalam diagram tersebut Ole R. Holsti menggambarkan hubungan antara Persepsi, citra dan sistem keyakinan, yang diterangkan sebagai berikut: tanggapan seseorang terhadap suatu situasi, atau stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Individu yang akan mengambil keputusan, dipengaruhi oleh berbagai proses

²³ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 21

psikologik yang mempengaruhi persepsi, misalnya kehendak untuk merasionalisasikan tindakan untuk mempertahankan pendapatnya sendiri, untuk mengurangi kecemasan dan lain sebagainya, dan psikologik lain yang membentuk kepribadianya. Sistem keyakinan sangatlah penting bagi seseorang dan system keyakinan membantu untuk berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi, sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan tindakan sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap informasi.²⁴

Dengan teori yang telah diuraikan tersebut, pengiriman pasukan Jepang ke Irak berpengaruh terhadap pendapat publik di Jepang. Seperti kita ketahui bahwa pasca Perang Perang Dunia II rakyat Jepang mengalami trauma terhadap perang sehingga opini publik berpengaruh terhadap keputusan yang dilakukan pemerintahan Jepang. Pada saat pecah Perang Teluk II Amerika Serikat meminta Jepang untuk memberikan partisipasinya terhadap operasi militer yang dilancarkan di Irak. Dimana Perdana Menteri waktu itu Toshiki Kaifu, kemudian mengajukan rancangan UU untuk mengirim personil SDF ke Irak sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB. Namun hal ini mengundang reaksi dari publik yang menentang keras terhadap pembuatan RUU ,dimana publik Jepang menganggap RUU tersebut bertentangan dengan konstitusi.²⁵ Hal ini berbeda dengan situasi Pasca 11 September 2001 saat Amerika Serikat mendesak Jepang untuk turut memberikan kontribusi yang besar

²⁴ *Ibid*, hal 21-23.

²⁵ Masaru Tamoto, "The Ideology of Nothingness : A Meditation on Japanese National

bagi perang melawan terorisme. Opini publik sebagai salah satu bentuk tekanan domestik di Jepang cenderung untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berencana mengirimkan SDF.

Adanya informasi tentang pengiriman pasukan Non-Tempur Jepang ke Irak menimbulkan reaksi bagi publik Jepang. Dalam informasi tersebut muncullah suatu fakta yang merupakan suatu sistem, keyakinan, citra tentang apa yang telah, sedang dan akan terjadi. Fakta dalam kasus ini adalah adanya pengiriman pasukan Non-Tempur Jepang ke Irak yang akan diikuti pula oleh sebuah nilai dimana dalam hal ini berkaitan dengan citra tentang apa yang seharusnya terjadi, yaitu pengiriman pasukan tersebut memberi nilai tersendiri bagi publik di Jepang. Setelah itu timbulah suatu persepsi tentang realitas yang terjadi, dan ini muncul dari pemikiran kita setelah kita melihat adanya suatu fakta dan nilai yang ada dan dalam hal ini adalah adanya isu teroris yang dianggap menjadi suatu ancaman dan adanya peristiwa 11 September 2001 yang menimpa Amerika Serikat dan adanya tanggapan Jepang sebagai negara sekutunya yang merasa harus membantu Amerika Serikat dalam membasmi terorisme dengan cara mengirimkan pasukan Non-Tempur Jepang Ke Irak, karena dalam hal ini Amerika Serikat beranggapan bahwa para teroris tersebut berada di Irak sampai terjadilah Invasi AS Ke Irak. Namun hal ini mendapat berbagai reaksi dari Publik Jepang terhadap pengiriman pasukan Non-Tempur Jepang ke Irak yang berupa

F. Hipotesa.

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis dapat mengambil suatu hipotesa bahwa :

Yakni adanya pengiriman pasukan Non-Tempur Jepang ke Irak itu berpengaruh terhadap pendapat publik di Jepang, dimana pendapat publik di Jepang terbelah menjadi dua, yaitu :

1. Mendukung dengan alasan bahwa adanya pengiriman tersebut merupakan langkah awal Jepang untuk membantu keharmonisan tata hubungan Jepang dilingkungan internasional, terutama menjaga citra baik dan meningkatkan hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat.
2. Menolak pengiriman pasukan tersebut karena dianggap pengiriman pasukan Jepang ke Irak melanggar konstitusi Jepang yang cinta damai.

G. Metode Penelitian.

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research) yaitu menerapkan pola-pola, pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literature, buku, majalah, jurnal, laporan media massa, serta sumber-sumber yang relevan lainnya termasuk data yang diperoleh dari berbagai website yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendiskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori atau konsep yang tepat,

11

BAB III

Akan menguraikan tentang reaksi Jepang terhadap krisis yang terjadi di Irak sampai pada pengiriman pasukan Non-Tempur Jepang Ke Irak.

BAB IV

Akan menjelaskan mengenai pengaruh pengiriman pasukan non-tempur Jepang ke Irak terhadap pendapat publik Jepang.

BAB V

Akan menjelaskan tentang krisis yang terjadi di Kalimantan dari bab-bab sebelumnya